

# **ANALISIS HUKUM HAK REHABILITASI HUKUM UNTUK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

**KASIMIN**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan sistem pembuktian pidana untuk hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berdasarkan hukum positif di Indonesia. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim antara putusan rehabilitasi dan pidana penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori pembuktian kejahatan dan teori rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yuridis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut, berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP, hakim untuk menentukan sah atau tidaknya terdakwa dan untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus memiliki dua syarat, yaitu: dua alat bukti yang sah, hakim harus yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan hal itu. Setiap tindak pidana pasti ada sanksi yang dibuktikan dalam proses persidangan dan harus ada putusan hakim. Dalam memutus tindak pidana narkotika terkait penyalahgunaan narkotika Golongan I selain tumbuhan, hakim wajib memberikan rehabilitasi medik dan sosial. Keleluasaan hakim untuk memutus tindak pidana terkait penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 127 jo Pasal 103 UU Narkotika. Faktor terjadinya disparitas putusan hakim tersebut karena penggunaan berbagai istilah bagi subjek pengguna narkotika yang berimplikasi pada mekanisme pelaporan dan tindakan rehabilitasi serta dampak tindak pidana tersebut. Selain itu, karena itu dalam penilaiannya mengalami kendala salah satunya adalah adanya perbedaan pandangan para penegak hukum dalam menyikapi status pecandu dalam kasus Narkotika. Di satu sisi ada frasa “tidak terbukti bersalah”, namun di sisi lain ada frasa “memerintahkan” yang merupakan pernyataan yang menjelaskan adanya kesalahan dan berupa hukuman bagi terdakwa. Kesimpulannya, terkait dengan hak rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkotika yang menjalani perawatan dan / atau perlakuan sebagai a masa menjalani hukuman. untuk pecandu narkotika. Perbedaan putusan hakim dalam perkara penyalahguna narkotika terlihat pada bukti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yang berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika berupa putusan hakim yang menjatuhkan masa jabatan yang lama. hukuman dengan memberikan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Merujuk pada Pasal 184 KUHAP, dimana alat bukti yang menggunakan hasil laboratorium forensik menjadi dasar yang memperkuat alat bukti sebagai alat bukti pedoman, alat bukti surat dan keterangan ahli.

Kata kunci: hak dan rehabilitasi

## LEGAL ANALYSIS OF REHABILITATION RIGHTS FOR THE NARCOTICS ABUSE IN INDONESIA

KASIMIN

### ABSTRACT

*This study aims to identify and explain the criminal proof system for rehabilitation rights for narcotics abusers based on positive law in Indonesia. And to find out and explain the factors causing the disparity in judge decisions between rehabilitation decisions and imprisonment for narcotics abusers in Indonesia. The theory used is the theory of proof of crime and the theory of rehabilitation. The research method used is a juridical analysis method with a qualitative approach. The results of the research, based on the formulation of Article 183 KUHP, the judge to determine whether a defendant is legal or not and to be able to pass a sentence on a defendant must have two conditions, namely: two valid pieces of evidence, the judge must have confidence that the defendant was guilty of doing so. Every criminal action must have a sanction which is proven in the trial process and there must be a judge's decision. In deciding criminal narcotics related to the abuse of narcotics Category I instead of plants, the judge is obliged to provide medical and social rehabilitation. The discretion held by the judge to decide crimes related to narcotics abuse in Article 127 jo Article 103 of the Narcotics Law. The factor in the disparity in judges' decisions is due to the use of various terms for a subject who uses narcotics which have implications for the reporting mechanism and rehabilitation measures and the impact of the crime. In addition, because of that the assessment encountered obstacles and one of them was the difference in views of law enforcers in addressing the status of addicts in the Narcotics case. On the one hand there is the phrase "not proven guilty", but on the other hand there is the phrase "ordered" which is a statement explaining the existence of an error and in the form of a punishment for the accused. The conclusion is that in relation to rehabilitation rights in narcotics crime as stipulated in the provisions of Article 103 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, judges are given the authority to examine and decide cases of narcotics abuse undergoing treatment and / or treatment as a period of serving a sentence. for narcotics addicts. The disparity in the judge's decision in the case of narcotics abusers can be seen in the evidence of the indictment filed by the public prosecutor which is based on Article 103 of the Narcotics Law in the form of a judge's decision to impose a length of time serving a sentence by granting rehabilitation rights for narcotics abusers. Referring to Article 184 of the Criminal Procedure Code, where evidence using forensic laboratory results is the basis that strengthens the evidence as evidence of guidance, evidence of letters and expert statements*

*Key words: rights and rehabilitation*